



Kajian Buku Teks Sejarah Kontroversial: Gerakan PRRI dan PERMESTA dalam Konflik dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Nasional Tahun 1958-1961

Kamelia Putri¹, Rendy Raihan², Rikza Fauzan³

Jurusan Pendidikan Sejarah / Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa / Kota Serang / Indonesia.

RIWAYAT ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 9 Mei 2024

Diterima dalam bentuk
revisi 27 Mei 2024

Dipublish 1 Juli 2024

ABSTRAK

Peristiwa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Semesta) merupakan dua gerakan separatis yang terjadi di Indonesia pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. PRRI diumumkan pada 15 Februari 1958 di Sumatera Barat oleh beberapa tokoh militer dan politisi yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan pusat di bawah Presiden Soekarno. Sementara itu, Permesta dideklarasikan pada 2 Maret 1957 di Sulawesi Utara oleh tokoh-tokoh militer yang juga menginginkan otonomi daerah yang lebih besar dan perbaikan ekonomi di wilayah mereka. Kedua gerakan ini mencerminkan ketidakpuasan daerah-daerah luar Jawa terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dan terlalu sentralistik. Adapun tujuan penulisan ini ialah untuk menggali lebih dalam tentang dinamika konflik dan dampaknya bagi kondisi sosial dan ekonomi di daerah-daerah yang terlibat dalam pemberontakan, serta bagaimana ketidakpuasan tersebut mempengaruhi tindakan-tindakan mereka.

Kata kunci:

Gerakan, Pemberontakan,
Permesta, PRRI, dan
Revolutioner.

PENDAHULUAN

Pembelajaran sejarah pada dewasa ini masih dianggap sebelah mata, bahkan bagi pejabat di suatu negara. Hingga muncul isu untuk menghilangkan pembelajaran sejarah dari mata pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah. Hal ini tentu jelas sangat berbahaya bagi perkembangan generasi muda saat ini. Peter Carey (2020) menjelaskan apabila pembelajaran sejarah dihilangkan akan menghilangkan esensi suatu bangsa sehingga bangsa tersebut bagaikan bangsa "tweede hand" yaitu bangsa yang berada dibawah naungan sejarah bangsa lain, masyarakat akan tidak tahu jati diri bangsa mereka. Selanjutnya, dilihat bahwa tulisan sejarah yang beredar pada saat ini merupakan

¹ 2288210036@untirta.ac.id

©2024. Kamelia Putri. Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

kebanyakan karya orang Asing dibandingkan orang Indonesia sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa masih banyak kekurangan masyarakat kita sendiri untuk menulis sejarahnya dan menjelaskan mengenai bangsa sendiri dan apabila terjadi penghilangan pembelajaran sejarah tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan rasa kesadaran bagi para masyarakat Indonesia terutama generasi muda. Generasi muda seharusnya mengilhami perkataan Bung Karno mengenai "Jasmerah" yaitu Jangan meninggalkan sejarah, dan juga perkataan Hitler yang berintikan "Bangsa yang akan hancur adalah bangsa yang tidak mengenal sejarah bangsa tersebut". Dengan begitu, mereka akan sadar bagaimana urgensi pembelajaran sejarah bagi masyarakat Indonesia terutama generasi muda yang saat ini sudah mulai luntur kesadaran sejarahnya. Hal ini disebabkan pembelajaran sejarah dirasa masih kurang efektif untuk mengunggah rasa kebangsaan bagi generasi muda. Pembelajaran sejarah masih sebatas cerita-cerita belaka yang masih belum mengenai sasaran yang ingin dicapai yaitu makna dalam setiap peristiwanya.

Hal ini perlu dicari solusi bersama untuk mengatasinya. Dibutuhkan angin segar dalam menangani permasalahan ini. Sebenarnya, dalam pembelajaran sejarah sendiri mempunyai solusi terbaik dengan adanya sejarah kontroversial. Namun, masih kurangnya pemahaman serta kurang diaplikasikan dalam pembelajaran hingga menyebabkan permasalahan tersebut terus terjadi. Padahal, apabila diimplementasikan dalam pelajaran, akan menarik minat peserta didik dalam mempelajari sejarah yang kekinian, selain itu akan menarik minat mereka untuk berpikir kritis terhadap suatu hal dalam sejarah dan terus ingin mencari tahu hal-hal yang ada di sejarah kontroversial (Arif, 2013).

Dalam pembelajaran sejarah kontroversial sendiri dapat memberikan kebebasan bagi para peserta didik dalam bernalar kritis terhadap suatu hal dan berpotensi akan menambah wawasan mereka dalam sejarah. Hal ini dapat menjadikan peserta didik akan selalu menantikan pembelajaran sejarah di setiap minggunya. Sama seperti halnya, dalam pembelajaran sejarah, membutuhkan komponen-komponen tersebut untuk mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, dan juga berpikir kritis serta kreatif peserta didik.

Apabila ditelisik lebih mendalam, mengenai pembelajaran seperti apa dalam mempelajari sejarah kontroversial. Setiap hal kontroversial melekat dalam pembelajaran sejarah, hal ini dilihat dari banyak sudut pandang yang terdapat dalam kita memahami berbagai macam peristiwa sejarah. Kadang bisa diterima oleh masyarakat, kadang pula tidak diterima, bahkan muncul tekanan dari penguasa akan hal ini karena dapat mempengaruhi legitimasinya (Arif, 2013). Kontroversial itu sendiri muncul karena setiap pendapat orang pastinya mempunyai landasan yang kuat terkait hal yang ingin dibelanya. Isu kontroversial ini bahkan dapat memecah belah masyarakat apabila tidak ada rasa terbuka masyarakat dalam melihat berbagai macam peristiwa sejarah yang ada (Hartono & Huda, 2020).

Bahkan, dalam seabad ini sudah ada sekitar 20 peristiwa sejarah yang terangkum sebagai sejarah kontroversial seperti peristiwa G30S, Supersemar, Penjajahan 350 Tahun Belanda, Agama R.A Kartini dan lain sebagainya, belum lagi peristiwa lain yang masih perlu dipertanyakan keabsahannya (Adam, 2007). Interpretasi sering dianggap sebagai sumber permasalahan sehingga timbul berbagai macam isu isu kontroversial ini, adanya keinginan penguasa ataupun subjektivitas ini mendasari berbagai macam peristiwa sejarah memiliki sudut pandang dari setiap orangnya dan mengakibatkan terpecah belahnya pemahaman terkait hal tersebut (Wijaya, 2017).

Kemudian, muncul rasa ketidakpercayaan terhadap peristiwa sejarah yang terjadi apakah sudah benar ataukah hanya interpretasi yang membuat itu ada, sehingga muncul gugatan terhadap sejarah. Namun, sepanjang sumber baru yang ada, serta pemikiran para sejarawan, kontroversi sejarah akan terus ada dan berkembang semakin pesat (Irwan, 2016). Adapun syarat yang harus dimiliki guru untuk mengajarkan pembelajaran sejarah kontroversial ini adalah keinginan kuat dalam menganalisis peristiwa kontroversial dengan selalu up to date mengkaji riset terbaru, paham dalam penguasaan sumber-sumber sejarah kontroversial, memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka serta netral, memiliki rasa kemanusiaan dan tanggung jawab moral dalam membawa kebenaran kepada peserta didik (A. S. Nugroho, 2017).

Salah satu materi sejarah kontroversial dalam narasi teks sejarah yang terdapat dalam buku teks di jenjang sekolah menengah atas. Yaitu mengenai materi peristiwa pemberontakan PRRI dan PERMESTA. Peristiwa pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Semesta) di Indonesia pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an mengandung berbagai kontroversi yang masih diperdebatkan hingga kini. Adapun perdebatan mengenai apakah PRRI dan Permesta merupakan gerakan murni untuk mendapatkan otonomi daerah dan memperbaiki kebijakan ekonomi yang tidak adil dari pemerintah pusat, atau apakah mereka bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah dan mendirikan negara baru. Kontroversi ini juga ada pada apakah gerakan ini didorong oleh kepentingan elit lokal yang merasa tersingkirkan oleh kebijakan pusat, atau apakah mereka benar-benar mewakili aspirasi masyarakat setempat.

Lalu adanya bukti yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat, yang khawatir terhadap pengaruh komunis di Indonesia, memberikan dukungan senjata dan bantuan kepada para pemberontak. Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh asing mempengaruhi dinamika internal Indonesia pada waktu itu. Pelaksanaan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah pusat yang dilakukan untuk menumpas PRRI dan Permesta dituduh menyebabkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk sipil. Hal ini menciptakan kontroversi mengenai penggunaan kekuatan oleh negara dan dampaknya terhadap warga sipil.

Terdapat narasi resmi dari pemerintah pusat menggambarkan PRRI dan Permesta sebagai pemberontakan yang mengancam kesatuan negara. Namun, di daerah-daerah yang terlibat, gerakan ini sering dipandang sebagai upaya sah untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Media pada masa itu juga mempengaruhi persepsi publik, baik secara nasional maupun internasional, mengenai legitimasi dan tujuan dari kedua gerakan tersebut. Pemberontakan ini memperkuat kebijakan sentralisasi di bawah Presiden Soekarno dan kemudian di era Orde Baru. Kontroversi ini berkaitan dengan apakah langkah-langkah tersebut benar-benar diperlukan untuk menjaga keutuhan negara atau justru menekan aspirasi daerah.

Adapun terdapat sentimen-sentimen warisan dari peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta masih dirasakan hingga saat ini dan sekarang, dengan beberapa pihak yang masih memperdebatkan dampak jangka panjang dari pemberontakan ini terhadap politik dan hubungan pusat-daerah di Indonesia. Kontroversi-kontroversi ini juga telah menunjukkan bagaimana kompleksitas dari peristiwa PRRI dan Permesta, di mana berbagai perspektif dan kepentingan saling beradu, mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam sejarah politik Indonesia.

METODE

Pada artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan suatu informasi yang bersifat deskriptif baik dalam wujud tertulis maupun lisan yang diambil dari perilaku seseorang yang dapat diteliti (Moleong, 2014). Kemudian di dalam bukunya Sugiono (2013), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk meneliti suatu gejala alamiah yang nantinya membuatkan sebuah hasil penelitian dengan hasil akhir yang berpacu pada makna dari suatu generalisasi. Berdasarkan pernyataan di atas penelitian kualitatif adalah penelitian yang membuatkan hasil berupa data yang sesuai dengan keasliannya, tidak ada manipulasi atau rekayasa untuk mendapatkan hasil tersebut. Jenis data tersebut dapat diambil berupa data tertulis maupun lisan sesuai dengan kebutuhan seorang peneliti.

Artikel ini juga menggunakan pendekatan deskriptif dimana metode deskriptif adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah terkait objek yang sedang diteliti oleh seorang peneliti dengan cara memaparkan menjelaskan maupun dengan menggambarkan suatu objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang sesuai dengan keasliannya (Nawawi, 2015). Kemudian penggunaan pendekatan deskriptif pada artikel ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu gambaran atau penjelasan mengenai bagaimana peristiwa pemberontakan PRRI atau PERMESTA menjadi kajian utama oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang dibutuhkan oleh penulis.

Studi literatur merupakan langkah-langkah yang diambil oleh penulis dalam proses penghimpunan data lalu membaca dan mengambil poin-poin penting yang dibutuhkan dalam artikel ini serta mengolahnya untuk mendapatkan referensi yang sesuai data-data yang diambil dari jurnal, buku, artikel ilmiah, maupun sumber-sumber kredibel lainnya. Dalam hal ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal dan artikel ilmiah mengenai pemberontakan peristiwa PRRI atau PERMESTA (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Narasi Sejarah Pada Buku Teks

Perjuangan bangsa Indonesia melawan disintegrasi bangsa memang tidak mudah. Terdapat berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia pergolakan, seperti apa yang harus terus terjadi di Indonesia dan hal tersebut sering muncul di benak pertanyaan khalayak ramai. Pergolakan yang terjadi pada masa itu salah satunya di daerah Pulau Sumatera tepatnya di Sumatera Barat yaitu terjadinya pemberontakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau kerap disebut dengan PRRI. Selain itu di Sulawesi juga terjadi pemberontakan yang dipelopori oleh perjuangan rakyat semesta atau disebut dengan PERMESTA. Awal mula terjadinya pemberontakan yang diinisiasi oleh PRRI ini diawali dengan adanya pembentukan dewan-dewan di berbagai wilayah Sumatera Barat.

Pada tanggal 20 Desember 1956 terjadi pembentukan dewan Banteng yang dipimpin oleh Kolonel Achmad Hussein yang berlokasi di Sumatera Barat dan pembentukan dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Malauddin Simbolon yang berlokasi di Sumatera Utara. Kemudian, pada

pertengahan Januari 1957 dibentuk dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian yang berlokasi di Sumatera Selatan dan terakhir pada tanggal 18 Februari 1957 terbentuklah dewan Manguni yang dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual yang berlokasi di Sulawesi (Wiyatmi, 2013).

Pada tanggal 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Achmad Hussein mendirikan sebuah organisasi yaitu sebuah gerakan yang bertujuan menyelamatkan negara Republik Indonesia. Gerakan tersebut akhirnya berhasil mendirikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan lokasi pemerintahan di Bukittinggi yang dipimpin oleh Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri PRRI. Setelah itu pada tanggal 2 Maret 1958 terbentuklah gerakan yang mendukung PRRI di wilayah Sulawesi yaitu perjuangan rakyat semesta atau PERMESTA.

Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam PERMESTA antara lain Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, Mayor Gerungan, serta Letnan Kolonel Saleh Lahade. Pada saat pembentukan permesta ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan akan tetapi pusat pemerintahannya berada di Manado atau Sulawesi Utara. Dengan demikian gerakan PRRI dan PERMESTA pada saat itu sering disebut dengan gerakan pemberontakan dan atas keberhasilannya diproklamirkan PRRI di Sumatera dan permesta di Sulawesi membuat pemerintah Indonesia menjadi membuat keputusan untuk menutup gerakan-gerakan yang dianggap merusak kedaulatan negara Indonesia (Sarlian, 2020).

Berbagai permasalahan muncul setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, pergolakan ini terjadi bukan dari sisi eksternal tetapi dari sisi internal yaitu banyak rakyat Indonesia sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan sehingga menyebabkan terjadinya pergolakan. Diawali oleh permasalahan Darul Islam, ancaman komunis, dan juga pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta. Berbagai permasalahan ini diakibatkan oleh tidak meratanya ekonomi di Indonesia kemudian terjadinya pembekuan institusi sipil di wilayah Sumatera Barat dan yang selanjutnya adalah gagalnya pemilihan umum sehingga dari permasalahan tersebut timbul rasa kecewa pada masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi pada saat itu.

Tepat pada tanggal 10 Februari 1958, Kolonel Achmad Hussein yang pada saat itu menjabat sebagai ketua dewan perjuangan mengeluarkan sebuah ultimatum dengan rincian isi yaitu: (a) kabinet Djuanda dibubarkan dan pengambilan mandat kepada presiden dalam kurun waktu 5 kali 24 jam, (b) Hamengkubuwono IX dan Muhammad Hatta dipilih sebagai pembentuk kabinet baru, (c) kabinet baru bekerja sampai diadakan pemilu, (d) Presiden Soekarno patuh terhadap konstitusi, (e) jika tuntutan ini tidak didengarkan dan tidak ditindaklanjuti maka kami akan mengambil langkah sendiri untuk menyuarakan aspirasi (Wahyudi dan Hardi, 2022).

Ketimpangan-ketimpangan pada saat itu yang terus terjadi dan menjadi suatu keresahan bagi masyarakat Sumatera dan Sulawesi. Salah satunya masyarakat di wilayah Sumatera Tengah yaitu dikarenakan sumber daya alamnya yang dihasilkan di daerah ini terus diekspor dan disalurkan ke Pulau Jawa oleh pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat pribumi di wilayah Sumatera Tengah tidak mendapat keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Setelah itu gerakan PRRI yang terus meluas dan menyebar di wilayah Sumatera seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Adapun gerakan PRRI ini dipelopori oleh para tokoh militer serta terdapat bagian lain yang tergabung dalam gerakan tersebut yaitu orang-orang dari sipil yang terdiri dari politikus, tokoh

agama, pejabat, pelajar, dan lainnya. Gerakan pemberontakan PRRI ini juga diakibatkan oleh polarisasi politik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Aspek lainnya yang menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat Sumatera Barat terhadap pemerintahan pusat yaitu karena adanya sentimen etnis dan agama.

Akibat dari permasalahan inilah yang menjadi latar belakang munculnya suatu pemberontakan yang semakin memanas situasinya. Namun jika dilihat lebih detail lagi bahwa permasalahan yang utama dari terjadinya gerakan PRRI dan permesta ini ialah karena adanya ketidakpuasan pemerintah daerah yang sudah dipendam oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Kemudian tidak adanya bukti sebuah desentralisasi di wilayah Indonesia yang menjadikan masyarakat pada saat itu membuat mosi tidak percaya kepada pemerintahan pusat. (May, 2015).

B. Hal Berkaitan Dengan Peristiwa Ini Yang Tidak Dituliskan Di Dalam Buku Teks

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), adalah gerakan menuntut otonomi dan desentralisasi, yang berpusat di Sumatra Tengah, khususnya Sumatra Barat, dan Sulawesi Utara, terutama Minahasa. Pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sebuah gerakan militer menantang Jakarta, ia lebih berupa gerakan perjuangan agar pola kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi atau kepentingan daerah luar Jawa (Harvey 1989: 69). Para promotor gerakan melihat, bahwa penguasa di pusat tidak adil terhadap daerah, padahal daerah luar Jawa adalah sumber devisa utama bagi negara.

Begini juga realitas politik terpolarisasi antara Jawa dan luar Jawa, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa diwakili Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Faktor kekecewaan lainnya adalah terdapatnya persaingan di lingkungan militer antara daerah dengan pusat, serta tidak jelasnya batas-batas wewenang sipil dan militer turut mempercepat pemberontakan (Alisjahbana 1957: 16-17; Asnan 2003: 231; Cribb dan Kahin 2004: 381).

Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau *Staat van oorlog en beleg* (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Pada tanggal 10 Februari 1958, Simbolon dan Achmad Hussein mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam "Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara", yaitu: (a) Supaya dalam lima hari Kabinet Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden, (b) Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru, (c) Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono IX menerima permintaan ini, (d) Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru, (e) Bahwa Presiden Soekarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118). Adapun Pemerintah Djuanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, A. H. Nasution membekukan Komando Sumatra Tengah, dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Dahlan Djambek, dan Simbolon, dan memecat mereka dengan tidak hormat.

Beberapa penelitian dan buku, seperti "Feet to the Fire: CIA Covert Action in Indonesia, 1957-1958" oleh Kenneth Conboy dan James Morrison, menyoroti peran CIA dalam konflik tersebut.

Meskipun tidak ada rincian spesifik tentang keterlibatan FBI, fokus utama tampaknya adalah pada peran CIA dalam mendukung atau terlibat dalam konflik tersebut. Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, melalui agensi intelijen mereka seperti CIA, terlibat dalam upaya covert action di Indonesia selama periode pemberontakan PRRI dan Pernesta. Terdapat informasi yang mengungkap bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan senjata kepada anggota PRRI dan Pernesta selama pemberontakan tersebut. Melalui CIA, Amerika Serikat memberikan bantuan terselubung berupa pesawat tempur, tentara, dana, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya kepada PRRI dan Pernesta selama periode pemberontakan.

Adapun menurut sumber lain, bantuan dari Amerika Serikat diberikan melalui CIA pada 1958, dimulai dengan memberikan bantuan terselubung untuk PRRI dan Pernesta. Selain pesawat, CIA juga membantu dengan memberikan sejumlah senjata, peralatan, dana, serta tentara bayaran dari negara-negara seperti Taiwan, Polandia, Filipina, dan Amerika Serikat. Dengan demikian, informasi tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam memberikan bantuan senjata dan dukungan militer kepada anggota PRRI dan Pernesta selama pemberontakan tersebut. Buku-buku dan penelitian yang lebih mendalam secara khusus membahas peran Amerika Serikat dalam mendukung atau mempengaruhi pemberontakan tersebut.

C. Dampak dari PRRI dan PERNESTA

a. Dampak PRRI dan PERNESTA untuk Indonesia

Dampak dari pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat serta Perjuangan Rakyat Semesta atau PERNESTA di Sulawesi tidak hanya terjadi pada saat di arena perang saudara. Akan tetapi juga setelah terjadi perang saudara tersebut akibat dari pemberontakan PRRI dan PERNESTA memakan banyak korban. Pada laporan yang tercatat menyebutkan bahwa dalam 2 tahun pertama prajurit dari pihak pemerintahan memakan korban sebanyak 983 korban terbunuh, kemudian 1695 korban luka-luka, serta 154 orang hilang akibat perang saudara tersebut. Kemudian di sisi lain, korban juga dialami oleh pihak PRRI dan PERNESTA yaitu sebanyak 6115 orang meninggal dunia serta 627 orang hilang. Berdasarkan jumlah korban tersebut juga terdapat korban yang belum ditemukan dari angkatan pemuda Minang karena mereka terbunuh serta hilang sampai berakhirknya perperangan.

b. Dampak PRRI dan PERNESTA bagi Masyarakat Sumatera dan Sulawesi

Pergolakan yang terjadi pada masa tersebut membuat rasa trauma bagi masyarakat setempat salah satunya di daerah Sumatera Barat dan Sulawesi. Pemberontakan PRRI dan PERNESTA yang terjadi pada tahun 1958 sampai 1961 menyisakan rasa trauma mendalam pada masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi dikarenakan banyak terjadi jatuhnya korban jiwa akibat pemberontakan tersebut. Harta benda yang dimiliki oleh masyarakat sipil pun lenyap dan yang lebih parah dari dampak pemberontakan PRRI dan PERNESTA ini adalah dampak psikologis bagi masyarakat. Gerakan pemberontakan ini dianggap sebagai membawa nasi buruk bagi masyarakat Sumatera Barat (Ronidin, 2010).

Tidak hanya itu, pemberontakan PRRI dan PERNESTA ini juga menjadikan banyaknya pertumpahan darah akibat dari gerakan ini. Banyaknya korban yang tewas dari masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi akibat dari pertumpahan darah atau perang antar saudara ini. Selain itu

munculnya juga rasa trauma dari masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya pemberontakan PRRI dan PERMESTA ini yang awalnya memiliki tujuan yang baik untuk meratakan pembangunan dan ekonomi antara pulau Jawa dan pulau lainnya akan tetapi berdampak buruk pada masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi sendiri baik itu banyak kehilangan nyawa maupun yang memiliki rasa trauma mendalam akibat gerakan-gerakan tersebut.

Penyebab peristiwa tersebut tidak diungkapkan secara lengkap dan komprehensif. Akan tetapi sebagian munculnya PRRI atau PERMESTA merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Perasaan kecewa inilah yang disebabkan karena adanya ketimpangan mengenai otonomi daerah. Semua kegiatan pembangunan terfokuskan di pusat, sedangkan wilayah yang berada di luar pulau jawa kurang diperhatikan. Pemerintah pusat menganggap Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI sebagai pemberontakan yang harus ditumpaskan. Akan tetapi, jika dipahami makna dari latar belakang munculnya gerakan PRRI dan PERMESTA ini adalah karena munculnya rasa kecewa atas kebijakan pemerintah pusat berupa sentralisasi kekuasaan serta tidak meratanya pembangunan di Indonesia. PRRI dan PERMESTA juga bukan gerakan separatis tapi koreksi total dan keras dari rezim pusat yang dianggap melanggar konstitusi.

KESIMPULAN

Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) merupakan babak penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan ketegangan politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah-daerah tertentu. Dengan latar belakang ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan di Jakarta, gerakan ini menggambarkan kompleksitas dinamika politik dan sosial pada masa itu. Dari berbagai sumber yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan ini memiliki dampak besar, termasuk korban jiwa, kerugian materiil, dan ketegangan politik yang berkepanjangan. Puncak pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi ketika sejumlah tokoh militer dan politik setuju untuk membentuk pemerintahan alternatif di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan politik yang melanda negara pada masa itu. Dengan keterlibatan eksternal, terutama dari Amerika Serikat melalui CIA, pemberontakan ini juga mencerminkan geopolitik yang kompleks dan peran aktor luar dalam konflik internal suatu negara. Meskipun pemberontakan PRRI dan Permesta berakhir dengan penumpasan oleh pemerintah pusat, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Gerakan ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya dialog, kesatuan, dan keadilan dalam membangun negara yang kokoh dan stabil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penulisan artikel ini. Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih kepada Bpk Rikza Fauzan, M. Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kontroversial yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan selama proses peekuliahinan ini berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas fasilitas dan sumber daya yang diberikan untuk mendukung penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yaitu Kamelia dan Rendy yang telah bekerja sama dan memberikan kontribusi berharga dalam pengumpulan data dan analisis. Kami juga menghargai dukungan moral dan material dari keluarga serta teman-teman yang selalu memberikan semangat selama proses penulisan artikel ini. Akhir kata, kami berharap penulisan artikel yang terformat dalam laporan tugas penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Jurusan Pendidikan Sejarah dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Gardner, Paul F. (2001). Feet to the Fire: Aksi Terselubung CIA di Indonesia, 1957–1958. *Jurnal studi Perang Dingin Pers MIT* volume 3, nomor 1, Musim dingin 2001 hal 145-146.
- Hartono, Y., & Huda, K. (2020). Development concept of controversial history material in senior high school in Indonesia. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3452144.3452282>.
- Harvey, Barbara Sillars. (1989). PERMESTA Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta: Grafitipers.
- Irwan, A. (2016). KETIKA SEJARAH DIGUGAT? (Mengapa Sering Terjadi Kontroversi dalam Sejarah?). *Jurnal Penelitian Humano*, 7(2), 192–206.
- Nopriyasman. (1988). Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA). Jakarta. kemendikbud.go.id.
- May, E. (2015) 'Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Dan Gagalnya Penerapan Sistem Otonomi Daerah Di Sumatera Barat 1956-1961', pp. 1–53.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2015). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nugroho, A. S. (2017). Controversial Issues in History Learning: Problems or Challenges ? Atlantic Press, 109 (Aecon), 22–25.
- Nugroho, A. S. dan I., & Jazimah. (2015). Muatan Sejarah Peristiwa Kontroversial (Sejarah Kontroversial) Pada Buku Teks Sejarah Sma Kurikulum 2013 Controversial History Events Content on High School History Text Book Curriculum 2013. HasilHasil Penelitian Dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, September, 131–136.
- Nurbaity, N. (2022). Peristiwa PRRI/Permesta Dalam Pandangan Ingatan Antagonistik Dan Kosmopolitan Dan Representasi Identitas Budaya Masyarakat Tionghoa Era Soeharto. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Ronidin, R. (2010). MASYARAKAT MINANGKABAU PASCAPRRI: Dalam cerpen Ketika Jendral Pulang karya Khairul Jasmi. *Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa dan Pembelajaran Bahasa*, 3(2), 152-160.
- Sarilan, S. (2020) THE NEGATION OF PRRI IN HIGH SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS. *Journal of History Education and Religious Studies*, 1(1), 40-51.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, F. and Hardi, E. (2021) 'Pemilihan Nagari Batu Kambing Sebagai Tempat Tahanan PRRI', 3(1), pp. 298–308.
- Wijaya, D. N. (2017). Blue-Print Pembelajaran Sejarah Berbasis Kontroversi. *Vidya Karya*, 31(1), 19–28. <https://doi.org/10.20527/jvk.v31i1.3970>
- Wiyatmi, W. W. (2013). Representasi sejarah Indonesia dalam novel-novel karya Ayu Utami. *LITERA*, 12(2).
- Zed, M (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zed, M. (2009). Keterlibatan CIA dalam Kasus PRRI.